

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoharjo, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia.
- Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, 2003, *Hukum Administrasi negara*, Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta.
- Indroharto, 1999, *Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Ismail Ramadan, 2012, *Problematikan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 1989, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon, et. al, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Wiyono, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusomo, 2009, *Penemuan Hukum*, liberty, Yogyakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2016, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Subekti, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketujuh Belas, PT. Intermasa, Jakarta.

- Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prildy Nataniel Boneka, 2014, *tinjauan hukum putusan ptun dalam rangka eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, Jurnal, Lex Administratum, Vol. II/No.2.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2009, *Makalah Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta.
- Maridjo, SH.MH, 2016, *Analisis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Pemberhentian Kepala Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 074/G/2015/PTUN-SMG)*, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN : 2302-2752, Vol. 5 No. 2.
- Victor Vayed Neno, 1989, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni Bandung.

B. Peraturan PerUndang- Undangan

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Sumber Lain

Wawancara Praktisi Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

http://www.ptunmataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaksanaan-putusan-ptun-danotonomi-daerah-sebagai-wujud-supremasihukum&catid=58:artikel_pengadilan&Itemid=142 (2 Maret 2013).
<http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5187>